

ABSTRAK

Sengketa pertanahan merupakan salah satu permasalahan yang masih sering terjadi di Indonesia, khususnya sengketa yang berkaitan dengan keputusan administrasi pertanahan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penyelesaian sengketa tersebut tidak hanya bergantung pada putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan yang diterapkan oleh BPN dalam melaksanakan kewenangannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Peradilan Tata Usaha Negara serta implementasi kebijakan tersebut dalam menghadapi sengketa pertanahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian non-doktrinal dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa pertanahan dipengaruhi oleh faktor regulasi, kualitas administrasi pertanahan, koordinasi antarinstansi, sumber daya manusia, serta kelengkapan data fisik dan data yuridis pertanahan. Implementasi kebijakan dilakukan melalui penanganan administratif, mediasi, peningkatan kualitas administrasi pertanahan, serta pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan administrasi pertanahan, peningkatan koordinasi antarinstansi, dan optimalisasi pelaksanaan putusan PTUN guna mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

Kata Kunci: Badan Pertanahan Nasional, kebijakan, sengketa pertanahan, Peradilan Tata Usaha Negara.